

Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan di Daerah Pedesaan

Faizal Luqman^{1*}, Anantasya Hasim Sulaikhan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ² Universitas Buddhi Dharma, Tangerang, Indonesia

Abstract: This research aims to analyze the role of institutional mechanisms in supporting the advancement of women in rural areas. The focus of this study is to strengthen institutions that empower women and promote gender equality, as well as improve the well-being of women in rural areas. The research methods used include literature analysis and case studies. The findings of the research indicate that strong institutional mechanisms facilitate rural women's access to resources, education, and economic opportunities. A comprehensive approach that includes skills enhancement, organizational management support, and fair division of labor contributes to the empowerment of women in rural areas. The implementation of these solutions is expected to enhance women's empowerment, promote inclusive rural development, improve family welfare, and achieve better gender equality. This research has policy implications for strengthening institutional mechanisms to enhance the role of women in rural development.

Article History

Received : 12 Nov 2023

Revised : 05 Mar 2023

Published : 30 June 2023

Key Words:


Emotional, Gender, Learning Effectiveness, Social Interaction.

Copyright

© Saree, Faizal Luqman et al

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

 <https://doi.org/10.47766/saree.v5i1.920>

 Corresponding Author: faizalluqman@uinsu.ac.id



Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mekanisme kelembagaan dalam mendukung kemajuan perempuan di daerah pedesaan. Fokus penelitian ini adalah untuk memperkuat kelembagaan yang berperan dalam memberdayakan perempuan dan menciptakan kesetaraan gender serta peningkatan kesejahteraan bagi perempuan di pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa mekanisme kelembagaan yang kuat memfasilitasi akses perempuan pedesaan terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi. Pendekatan komprehensif melalui peningkatan keterampilan, dukungan manajemen organisasi, dan pembagian kerja yang adil berkontribusi pada pemberdayaan perempuan di pedesaan. Implementasi solusi-solusi ini diharapkan meningkatkan pemberdayaan perempuan, menciptakan pembangunan desa inklusif, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan gender yang lebih baik. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan dalam penguatan mekanisme kelembagaan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pedesaan.

Kata Kunci:

Mekanisme Kelembagaan, Kemajuan Perempuan, Daerah Pedesaan, Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan,

PENDAHULUAN

Eksplorasi terhadap peran perempuan saat ini menjadi kajian yang unik dan menarik. Hasil konferensi gender sedunia memaparkan bahwa masalah perempuan mencakup beberapa hal yaitu, mencakup perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan; mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan; hak asasi perempuan; perempuan dan media; perempuan dan lingkungan hidup; serta anak perempuan (Jiao et al., 2022; Kang & Tripp, 2018). Perhatian terhadap peran perempuan juga menjadi parameter kemajuan sebuah bangsa yang merdeka (Bessell, 2016).

Pemahaman terhadap mekanisme solutif terhadap rangkaian problematika gender tersebut membutuhkan peran kolaboratif antar lini, baik pemerintah dengan masyarakat, atau keluarga dengan lembaga pendidikan (Cho et al., 2008; Kurzman et al., 2019). Dalam konteks penelitian, pemahaman dan mekanisme kelembagaan diduga berkontribusi terhadap kemajuan perempuan di daerah

pedesaan. Penelitian ini mengakui tantangan unik yang dihadapi oleh perempuan di lingkungan tersebut dan peran potensial lembaga dalam mendorong kemajuan peran perempuan baik secara individu di rumah tangga atau di dalam ranah publik dan masyarakat (Junaidi & Sukanti, 2022; O'Brien, 2012).

Penelitian ini menjadi unik karena berbeda dengan penelitian gender yang pada umumnya mengkaji secara individual dan keagamaan. Seperti penelitian Sofia memaparkan perlunya pengakuan terhadap eksistensi perempuan (Aboim, 2020), perempuan dan hukum (Bessell, 2016), sementara penelitian Andersen mengakui dalam konteks demokrasi diperlukan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki (Andersen, 2023; O'Brien, 2018). Sedangkan penelitian Dutta lebih mengkedepankan kajian kesehatan mental yang dihadapi oleh perempuan (Dutta et al., 2022), sedangkan Ahlstand bahwa peran perempuan perlu dikampanyekan melalui media sosial (Ahlstrand, 2021). Kajian ini berbeda karena membahas eksistensi perempuan pedesaan ditengah berkembangnya paradigma konservatif masyarakat terhadap peran perempuan.

Pemberdayaan pada hakikatnya memang berkaitan dengan konsep kekuasaan, namun penting untuk memahami bahwa kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang positif dan memberdayakan (Hill, 2011; MacGregor, 2017). Pemberdayaan perempuan di pedesaan bukanlah tentang mendominasi atau menindas, melainkan memberikan kesempatan, akses, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan perempuan di pedesaan (Afsar & Kumari, 2020). Dengan memahami dan menerapkan konsep pemberdayaan yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan, perempuan di pedesaan dapat mengambil peran yang lebih signifikan dalam mengatasi hambatan dan mencapai kemajuan khususnya bagi sebuah bangsa (Muslim & Wandu, 2019; Pano et al., 2022).

Pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan merupakan hal yang penting dan relevan untuk mencapai kemajuan dan kesetaraan gender di masyarakat (Gupta et al., 2019). Perempuan di pedesaan memiliki potensi yang besar untuk berperan aktif dalam pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Bektas & Issever-Ekinci, 2019; Igwe et al., 2020).

Penting untuk memberikan perempuan di pedesaan posisi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Dengan memberikan keberanian untuk mengambil risiko dan keputusan, perempuan dapat menghadapi masalah dengan lebih percaya diri dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan desa.

Artikel ilmiah ini berfokus pada mekanisme kelembagaan yang dirancang untuk memfasilitasi kemajuan perempuan di daerah pedesaan. Ini memberikan gambaran umum tentang struktur dan inisiatif yang dibentuk untuk memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjenis kualitatif dengan teknik fenomenologi. Data penelitian diambil dari hasil kajian Pustaka baik dari penelitian relevan, sumber tugas akhir, dokumentasi digital, ataupun buku primer. Tema yang digunakan untuk mengkaji konseks penelitian yaitu berkaitan dengan Gender, Administrasi, Pembangunan Publik, Kebijakan Publik dan Desa. Data kemudian diolah dan dianalisis sesuai metode kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan pada hakikatnya berkaitan dengan konsep kekuasaan, namun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang positif dan memberdayakan. Pemberdayaan perempuan di pedesaan bukanlah tentang mendominasi atau menindas, melainkan memberikan kesempatan, akses, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan perempuan di pedesaan.

Pada dasarnya, pemberdayaan perempuan adalah proses (dan hasilnya) di mana perempuan -secara individu dan kolektif- menjadi pelaku yang aktif, berpengetahuan, dan berorientasi pada tujuan, yang mengambil dan/atau mendukung inisiatif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender" serta pertanyaan terkait kapasitas kelembagaan dan kontribusinya terhadap pemberdayaan perempuan pedesaan dan kesetaraan gender (Seidman & Alexander, 2020).

Pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan partisipasi aktif perempuan secara individu dan kolektif dalam mengatasi ketidaksetaraan gender. Secara operatif pemberdayaan perempuan adalah hal teknis, maka diperlukan pelibatan pengembangan kapasitas perempuan untuk menjadi pelaku yang berpengetahuan dan berorientasi pada tujuan. Dalam konteks ini, kapasitas kelembagaan merupakan elemen penting dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Pentingnya mekanisme Lembaga Pedesaan

Jenis lembaga antara lain meliputi Rukun Tetangga; Rukun Warga; Kader Posyandu; PKK; Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; Karang Taruna; Pos Pelayanan Terpadu; dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kebutuhan dan hambatan spesifik yang dihadapi perempuan di daerah pedesaan. Mekanisme ini dapat memberikan dukungan, sumber daya, dan peluang untuk memberdayakan perempuan dan memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek pembangunan pedesaan.

Mekanisme kelembagaan, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kader Posyandu, PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan di pedesaan.

Identifikasi terhadap kelembagaan yang ada saat ini di daerah pedesaan untuk mendukung kemajuan perempuan. Hal ini dapat mencakup kebijakan pemerintah, organisasi masyarakat, koperasi perempuan, inisiatif berbasis masyarakat, dan lembaga lain yang relevan (O'Brien, 2012).

Kelembagaan memiliki peran penting dalam memajukan perempuan di daerah pedesaan. Melalui kelembagaan, perempuan dapat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan (Igwe et al., 2020; Kazumi & Kawai, 2017). Selain itu, kelembagaan juga dapat menjadi wadah untuk advokasi hak-hak perempuan dan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, Melalui mekanisme ini, perempuan dapat memperoleh akses, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan (Jiao et al., 2022).

Efektivitas mekanisme Evaluatif Lembaga Desa bagi Perempuan

Efektivitas mekanisme kelembagaan dalam mendorong kemajuan perempuan di daerah pedesaan. Kajian terhadap dampak akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, proses pengambilan keputusan, dan pemberdayaan secara keseluruhan (O'Connor, 2020).

terdapat relevansi yang mendalam antara mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan di daerah pedesaan dengan lembaga-lembaga pedesaan yang disebutkan, yaitu Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kader

Posyandu, PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai relevansi tersebut:

- (a) Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peran penting dalam membangun komunitas yang inklusif dan saling mendukung. Melalui mekanisme kelembagaan yang ada di RT dan RW, seperti musyawarah desa, kegiatan sosial, dan pengorganisasian masyarakat, perempuan di pedesaan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme ini dapat memberikan peluang bagi perempuan untuk menyuarkan aspirasi mereka dan berkontribusi dalam pengembangan desa.
- (b) Kader Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di pedesaan. Melalui mekanisme kelembagaan Posyandu, perempuan di pedesaan dapat terlibat dalam kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak, penyuluhan kesehatan, dan pelayanan kesehatan dasar. Hal ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan, serta meningkatkan peran dan partisipasi mereka dalam upaya pemberdayaan kesehatan keluarga.
- (c) PKK merupakan lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan keluarga di pedesaan. Melalui mekanisme kelembagaan PKK, perempuan di pedesaan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. PKK memberikan peluang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh pengetahuan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa.
- (d) Mekanisme kelembagaan yang terkait dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga juga memiliki relevansi dengan upaya pemberdayaan perempuan di pedesaan. Melalui program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga ini, perempuan di pedesaan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan keluarga, meningkatkan keterampilan pengasuhan anak, dan memperoleh akses ke program-program kesejahteraan sosial. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan

meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Gupta et al., 2019; Postiglione, 2015).

- (e) Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang juga memiliki potensi untuk mendorong pemberdayaan perempuan di pedesaan. Melalui mekanisme kelembagaan Karang Taruna, perempuan muda di pedesaan dapat terlibat dalam kegiatan sosial, pengembangan keterampilan, dan pelatihan yang berfokus pada pemberdayaan diri dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Organisasi ini dapat menjadi wadah bagi perempuan muda untuk mengembangkan kepemimpinan, keterampilan sosial, dan memperluas jaringan sosial.
- (f) Pos Pelayanan Terpadu merupakan lembaga yang menyediakan layanan publik secara terpadu, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Melalui mekanisme kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu, perempuan di pedesaan dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan terpadu terhadap layanan-layanan yang dibutuhkan. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, mengurangi kesenjangan akses, dan memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan pedesaan (O'Connor, 2020).
- (g) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (NGO), memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan di pedesaan. Melalui mekanisme kelembagaan ini, perempuan di pedesaan dapat memperoleh dukungan, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, lembaga-lembaga pedesaan yang disebutkan memiliki relevansi yang signifikan dengan mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan di daerah pedesaan. Melalui mekanisme kelembagaan ini, perempuan di pedesaan dapat memperoleh akses, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam upaya untuk mencapai pemberdayaan perempuan yang lebih luas, penting untuk menguatkan peran dan mendukung peran lembaga-

lembaga pedesaan tersebut dalam memfasilitasi kemajuan perempuan di daerah pedesaan.

Identifikasi Tantangan dan Kesenjangan

Tantangan dan kesenjangan dalam mekanisme kelembagaan yang ada. Faktor penghambat yang menghalangi perempuan dalam merealisasikan potensi penuh mereka di daerah pedesaan dan mengidentifikasi area di mana perbaikan atau dukungan tambahan diperlukan.

Rekomendasi dalam meningkatkan kelembagaan pedesaan bagi perempuan untuk meningkatkan mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan di daerah pedesaan. Rekomendasi ini dapat mencakup perubahan kebijakan, inisiatif peningkatan kapasitas, strategi keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Pentingnya masalah pemberdayaan perempuan tersebut didasarkan pada fakta bahwa masih banyak perempuan yang belum dapat mencapai tingkat pemberdayaan yang memadai, dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan faktor internal yang saling berinteraksi (Bessell, 2016; Rahayu & Lesmana, 2020).

Faktor-faktor eksternal meliputi aspek sosial-budaya, kebijakan pemerintah, peraturan hukum, dan implementasi kebijakan yang berlaku. Sosial-budaya dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah dan peraturan hukum juga dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, faktor geografis seperti infrastruktur yang terbatas atau jarak yang jauh antara daerah pedesaan dan perkotaan juga dapat menjadi hambatan bagi pemberdayaan perempuan. Terakhir, kecenderungan global seperti politik, ekonomi, dan teknologi komunikasi juga dapat memengaruhi kesempatan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai pemberdayaan.

Selain faktor-faktor eksternal, terdapat pula faktor-faktor internal yang memengaruhi pemberdayaan perempuan. Persepsi dan konsep diri perempuan dapat mempengaruhi keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap kemampuan dan potensi diri untuk mencapai pemberdayaan. Motivasi, stres kerja, aspirasi pekerjaan, dan karakteristik individu lainnya

juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan (Chen et al., 2022; Kang & Tripp, 2018).

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan, penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor penyebab yang telah disebutkan. Perlu adanya langkah-langkah yang komprehensif, seperti perubahan sosial-budaya yang inklusif, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan peraturan hukum yang melindungi hak-hak perempuan (MacGregor, 2017). Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan juga harus menjadi fokus utama dalam upaya pemberdayaan perempuan. Selain itu, perlu juga dukungan dalam hal pengembangan kapasitas, motivasi, dan pembangunan karakteristik individu perempuan guna menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dengan mengatasi faktor-faktor penyebab yang membatasi pemberdayaan perempuan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan di daerah pedesaan untuk mencapai potensi penuh mereka. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan secara keseluruhan.

Kontekstualisasi Kemajuan Perempuan di Daerah Pedesaan

Tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan, seperti akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, peluang ekonomi, dan proses pengambilan keputusan (Kurzman et al., 2019). Hal ini menekankan perlunya intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong pemberdayaan perempuan.

Perlu adanya upaya peningkatan keterampilan perempuan pedesaan. Konstruksi data dalam mengatasi fenomena di mana banyak perempuan pedesaan, terutama ibu rumah tangga, tidak memiliki keterampilan dan mengandalkan pendapatan suami, diperlukan upaya peningkatan keterampilan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan perempuan di pedesaan, seperti pelatihan keterampilan usaha, pertanian berkelanjutan, atau keterampilan teknis lainnya. Dengan meningkatkan keterampilan, perempuan pedesaan dapat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam perekonomian keluarga dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan suami.

Oleh sebab itu diperlukan peningkatkan manajemen organisasi dan pembagian kerja. Dalam konteks penelitian diperlukan kehadiran aparatur pemerintahan dalam pembuatan program membantu perempuan dalam mengatasi kendala pengetahuan tentang pentingnya berorganisasi dan manajemen organisasi yang baik, diperlukan upaya pengembangan kapasitas dan pendampingan. Pelatihan tentang manajemen organisasi, administrasi, dan pengaturan waktu dapat membantu perempuan dalam mengelola usaha pertanian dan organisasi dengan lebih efektif. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan pembagian kerja yang adil antara tanggung jawab rumah tangga dan urusan organisasi, sehingga perempuan dapat mengatur waktu dengan baik dan memiliki keseimbangan antara peran rumah tangga dan partisipasi dalam organisasi.

Kolaborasi Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan

Penekanan terhadap pentingnya integrasi pengembangan kelembagaan desa dalam perspektif gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam strategi pembangunan pedesaan. Penelitian ini akan menyoroti manfaat potensial mekanisme kelembagaan yang inklusif dan responsif terhadap gender dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Bessell, 2016).

Kontribusi terhadap pemahaman mekanisme kelembagaan dalam mendorong kemajuan perempuan di daerah pedesaan dan memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks ini, penelitian ini berusaha untuk berkontribusi pada tujuan kesetaraan gender dan pembangunan inklusif dalam masyarakat pedesaan.

Perempuan di daerah pedesaan sering menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme kelembagaan yang dapat mendukung kemajuan perempuan di daerah pedesaan. Peran kolaboratif ditunjukkan melalui sinergitas badan pemerintahan dan kebijakan, seperti komisi perempuan atau departemen kesetaraan gender, yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi disparitas gender di daerah pedesaan. Hal ini menyoroti peran lembaga-lembaga ini dalam advokasi hak-hak perempuan dan memastikan inklusi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan di daerah pedesaan, seperti sumber daya terbatas, hambatan budaya, dan norma patriarki. Ini juga mengidentifikasi peluang untuk kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Aboim, 2020),.

Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pemberdayaan perempuan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun dan mengembangkan kapasitas kelembagaan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan pedesaan dan pencapaian kesetaraan gender.

Pengembangan kapasitas kelembagaan yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan pada pemberdayaan perempuan pedesaan dan tercapainya kesetaraan gender. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, memberikan peluang yang adil bagi perempuan di pedesaan, dan mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan menuju kesetaraan gender yang lebih baik.

Keberhasilan Mekanisme Kelembagaan

Salah satu contoh keberhasilan mekanisme kelembagaan adalah program "Desa Pintar" di Indonesia, yang melibatkan pendirian pusat pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di pedesaan. Program ini telah berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan memberdayakan mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Program dan inisiatif yang diimplementasikan untuk memberdayakan perempuan di daerah pedesaan. Ini termasuk program pengembangan keterampilan, akses ke layanan keuangan, dukungan kewirausahaan, dan inisiatif peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan status sosial-ekonomi perempuan dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan pedesaan.

Dalam konteks kesetaraan gender, kapasitas kelembagaan memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan peluang bagi perempuan di pedesaan untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan yang mereka hadapi. Mekanisme kelembagaan yang kuat, seperti organisasi masyarakat, kelompok perempuan, atau lembaga pemberdayaan perempuan, dapat memberikan platform untuk perempuan pedesaan untuk berpartisipasi aktif, mengakses

sumber daya, mendapatkan pelatihan, dan mendapatkan dukungan dalam mengembangkan keterampilan dan kapasitas individu.

Pengembangan kapasitas kelembagaan juga dapat mencakup pembangunan keterampilan manajemen organisasi, pengembangan jaringan dan kemitraan, serta pembagian kerja yang adil. Melalui kapasitas kelembagaan yang diperkuat, perempuan di pedesaan dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks kesetaraan gender, kapasitas kelembagaan diduga mampu mengubah norma dan budaya yang tidak sejalan dengan kesetaraan gender, dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan perempuan pedesaan (Bektas & Issever-Ekinci, 2019).

Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan

Analisis ini menjelajahi mekanisme kelembagaan yang diterapkan untuk mendukung kemajuan perempuan di daerah pedesaan. Ini termasuk pembentukan badan pemerintah, kebijakan, dan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, representasi, dan kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan pedesaan.

Beberapa mekanisme kelembagaan yang dapat mendukung kemajuan perempuan di daerah pedesaan antara lain:

- (1)Kelompok Wanita Tani: Kelompok ini dapat memberikan pelatihan pertanian, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya bagi perempuan petani di pedesaan.
- (2)Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khusus untuk perempuan di pedesaan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
- (3)Forum Advokasi Perempuan: Kelembagaan ini dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di pedesaan, termasuk hak atas tanah dan keadilan gender.

Pertimbangan terhadap indikator seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, dan peningkatan hasil sosial-ekonomi. Hasil penelitian menyimpulkan dengan membahas arah masa depan untuk

memperkuat mekanisme ini dan memastikan kemajuan yang berkelanjutan bagi perempuan di masyarakat pedesaan.

Selain itu pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas baik secara kelembagaan desa maupun individu perempuan secara personal. Pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dimaknai sebagai kemampuan institusi atau organisasi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang mendukung pemberdayaan perempuan. Hal ini mencakup kemampuan institusi untuk menyediakan sumber daya, pelatihan, informasi, dan dukungan yang diperlukan oleh perempuan dalam upaya mereka untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Pengembangan kapasitas kelembagaan yang efektif melibatkan klarifikasi konseptual dan pemahaman yang sama di antara para pelaku kelembagaan untuk memastikan tujuan yang jelas dan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan.

Argumentasi Solutif

Argumentasi solutif terhadap perubahan dalam konteks pekerjaan perempuan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu intensitas tenaga kerja, persyaratan teknis, pembagian kerja seksual, bentuk mekanisme yang diperkenalkan, dan kelas sosial perempuan, dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan peran mekanisme kelembagaan dalam mendorong kemajuan perempuan di daerah pedesaan.

Pertama, intensitas tenaga kerja adalah salah satu faktor penentu perubahan dalam pekerjaan perempuan. Jika intensitas tenaga kerja meningkat, misalnya dalam konteks penanaman pada kondisi yang telah ada sebelumnya, hal ini dapat mempengaruhi peran dan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan tersebut. Intensitas tenaga kerja yang tinggi dapat menghadirkan tantangan bagi perempuan, terutama dalam hal keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik.

Kedua, persyaratan teknis yang obyektif dari metode atau tanaman baru juga dapat menjadi faktor penentu perubahan dalam pekerjaan perempuan. Jika ada perubahan dalam teknologi atau jenis tanaman yang digunakan, perempuan mungkin perlu memperoleh keterampilan baru atau menyesuaikan diri dengan persyaratan yang berbeda. Ini dapat mempengaruhi akses perempuan terhadap pekerjaan dan tingkat partisipasinya.

Ketiga, pembagian kerja berbasis gender pada keadaan sebelumnya juga dapat mempengaruhi perubahan dalam pekerjaan perempuan. Jika terdapat pembagian kerja yang kuat berdasarkan jenis kelamin, perubahan dalam mekanisme kelembagaan dapat mempengaruhi peran dan partisipasi perempuan dalam pekerjaan tersebut. Penting untuk memperhatikan dan mengatasi ketimpangan gender dalam pembagian kerja agar perempuan dapat memiliki akses yang setara dan peluang yang sama dalam pekerjaan.

Keempat, bentuk-bentuk mekanisme yang diperkenalkan juga dapat berperan dalam perubahan pekerjaan perempuan. Mekanisme kelembagaan yang mendukung pemberdayaan perempuan, seperti kebijakan yang inklusif, program pelatihan, dan dukungan finansial, dapat memberikan akses dan peluang yang lebih baik bagi perempuan di daerah pedesaan (Jamal et al., 2023). Mekanisme ini dapat membantu mengurangi hambatan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pekerjaan yang lebih maju dan beragam.

Kelima, kelas sosial perempuan juga dapat memengaruhi perubahan dalam pekerjaan mereka. Faktor-faktor seperti pendidikan, akses ke sumber daya, dan jaringan sosial dapat mempengaruhi kesempatan dan pilihan pekerjaan perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi agar perempuan dari berbagai kelas sosial dapat memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai kemajuan dalam pekerjaan (Dutta et al., 2022).

Studi tentang perempuan di sektor informal juga memberikan perspektif yang penting dalam memahami perubahan dalam pekerjaan perempuan di daerah pedesaan. Perempuan dalam sektor informal sering menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan pekerjaan, kurangnya perlindungan sosial, dan akses yang terbatas terhadap sumber daya dan peluang. Mekanisme kelembagaan yang memperhatikan dan mendukung kebutuhan perempuan di sektor informal dapat berkontribusi pada kemajuan mereka dalam pekerjaan.

Hasil analisis kritis terhadap faktor determinan perubahan dalam pekerjaan perempuan yang dihubungkan dengan mekanisme kelembagaan dalam konteks daerah pedesaan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme tersebut dapat berperan dalam mendorong kemajuan perempuan. Dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan, penting untuk

memperhatikan dan mengatasi faktor-faktor tersebut melalui langkah-langkah kebijakan dan program yang tepat.

Untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan di pedesaan, penting untuk memberikan mereka posisi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang inklusif, di mana perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan memberikan perempuan keberanian untuk mengambil risiko dan keputusan, mereka akan dapat menghadapi masalah dengan lebih percaya diri dan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan desa.

Diperlukan upaya peningkatan keterampilan, manajemen organisasi, dan pembagian kerja yang adil untuk membantu perempuan mengatasi kendala pengetahuan dan waktu dalam mengelola usaha pertanian dan partisipasi dalam organisasi. Melalui pendekatan yang komprehensif, perempuan di pedesaan dapat mengembangkan keterampilan, memperoleh pengetahuan, dan memiliki keseimbangan antara peran rumah tangga dan partisipasi dalam pembangunan desa.

Argumentasi solutif yang dapat diajukan untuk mengatasi isu-isu tersebut maka diperlukan optimalisasi dalam pemberdayaan perempuan desa. Perlu adanya perubahan paradigma berpikir masyarakat khususnya pihak keluarga dalam pemberdayaan dan kekuasaan. Diperlukan upaya kolaboratif antar aparat pemerintah dalam meningkatkan keterampilan perempuan pedesaan. Berkaitan dengan hal teknis pembagian kerja peran perempuan dalam ranah rumah tangga dan masyarakat diperlukan manajemen organisasi dan pembagian kerja. Artinya, meski berstatus rumah tangga para perempuan dituntut memiliki skala prioritas sehingga mampu berperan di masyarakat dan dunia kerja dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Mekanisme kelembagaan memainkan peran krusial dalam mendukung kemajuan perempuan di daerah pedesaan. Dengan memperkuat kelembagaan yang mendukung perempuan, diharapkan dapat tercipta kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan di pedesaan. Dengan adanya mekanisme kelembagaan yang kuat, perempuan di daerah pedesaan dapat lebih mudah mengakses sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi,

sehingga tercipta kemajuan yang berkelanjutan bagi mereka dan komunitas pedesaan secara keseluruhan. Melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan keterampilan, dukungan dalam manajemen organisasi, dan pembagian kerja yang adil, perempuan di pedesaan akan dapat mengambil peran yang lebih aktif dan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Dengan menerapkan solusi-solusi ini dan memperkuat peran mekanisme kelembagaan, diharapkan dapat terjadi peningkatan pemberdayaan perempuan di daerah pedesaan. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan desa yang lebih inklusif, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan terciptanya kesetaraan gender yang lebih baik.

REFERENCES

- Aboim, S. (2020). Gender in a Box? The Paradoxes of Recognition beyond the Gender Binary. *Politics and Governance*, 8(3), 231–241. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i3.2820>
- Afsar, M., & Kumari, S. (2020). Empowerment Of Women Journalists Through Technology In Rural Areas Of India. *3rd International Conference On Advanced Research In Social Science And Humanities*, 34, 43.
- Ahlstrand, J. (2021). *Women, Media, and Power in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003083252>
- Andersen, T. B. (2023). Does Democracy Cause Gender Equality? *Journal of Institutional Economics*, 19(2), 210–228. <https://doi.org/10.1017/S1744137422000236>
- Bektas, E., & Issever-Ekinci, E. (2019). Who Represents Women in Turkey? An Analysis of Gender Difference in Private Bill Sponsorship in the 2011–15 Turkish Parliament. *Politics & Gender*, 15(4), 851–881. <https://doi.org/10.1017/S1743923X18000363>
- Bessell, S. (2016). Good Governance, Gender Equality and Women's Political Representation: Ideas as Points of Disjuncture. In *The Public Law of Gender* (pp. 273–295). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316481493.013>

- Chen, B., Wang, X., & Gao, Y. (2022). Does Friend Support Matter? The Association between Gender Role Attitudes and School Bullying among Male Adolescents in China. *Children*, 9(8), 1139. <https://doi.org/10.3390/children9081139>
- Cho, S.-J., Hudley, C., Lee, S., Barry, L., & Kelly, M. (2008). Roles of gender, race, and SES in the college choice process among first-generation and nonfirst-generation students. *Journal of Diversity in Higher Education*, 1(2), 95–107. <https://doi.org/10.1037/1938-8926.1.2.95>
- Dutta, G. K., Sarker, B. K., Ahmed, H. U., Bhattacharyya, D. S., Rahman, M. M., Majumder, R., & Biswas, T. K. (2022). Mental Healthcare-Seeking Behavior during the Perinatal period Among Women in Rural Bangladesh. *BMC Health Services Research*, 22(1), 310. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-07678-z>
- Gupta, S., Vemireddy, V., & Pingali, P. L. (2019). Nutritional Outcomes of Empowerment and Market Integration for Women in Rural India. *Food Security*, 11(6), 1243–1256. <https://doi.org/10.1007/s12571-019-00978-z>
- Hill, C. (2011). *Enabling Rural Women's Economic Empowerment: Institutions, Opportunities and Participation*. September, 1–46.
- Igwe, J. N., Nzeadibe, A. C., & Ugwuanyi, C. S. (2020). Education for Inclusion: Numeracy Intervention in Second Chance Education of Market Women in Rural Nigeria. *African Population Studies*, 34(1). <https://doi.org/10.11564/34-1-1458>
- Jamal, A., Nasir, M., Syathi, P. B., & Fitriyani. (2023). Developing Village in the Former Conflict Region of Indonesia through Social and Economic Inclusion: Evidence from Aceh. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2178521>
- Jiao, H., Wang, L., & Shi, Y. (2022). How Does Institutional Environment in The Digital Context Affect Technology Entrepreneurship? The Moderating Roles of Government Digitalization And Gender. *Journal of Organizational Change Management*, 35(7), 1089–1112. <https://doi.org/10.1108/JOCM-10-2021-0321>
- Junaidi, J., & Sukanti, N. D. (2022). Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 25–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.632>
- Kang, A. J., & Tripp, A. M. (2018). Coalitions Matter: Citizenship, Women, and Quota Adoption in Africa. *Perspectives on Politics*, 16(1), 73–91.

- <https://doi.org/10.1017/S1537592717002225>
- Kazumi, T., & Kawai, N. (2017). Institutional Support and Women's Entrepreneurial Self-Efficacy. *Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(3), 345–365. <https://doi.org/10.1108/APJIE-12-2017-041>
- Kurzman, C., Dong, W., Gorman, B., Hwang, K., Ryberg, R., & Zaidi, B. (2019). Women's Assessments of Gender Equality. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 5, 237802311987238. <https://doi.org/10.1177/2378023119872387>
- MacGregor, S. (2017). *Routledge Handbook of Gender and Environment*. Taylor & Francis.
- Muslim, R., & Wandu, J. I. (2019). Career And Family: A Study Of Women Leadership. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 81–88. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13464>
- O'Brien, D. Z. (2012). Gender and Select Committee Elections in the British House of Commons. *Politics & Gender*, 8(02), 178–204. <https://doi.org/10.1017/S1743923X12000153>
- O'Brien, D. Z. (2018). "Righting" Conventional Wisdom: Women and Right Parties in Established Democracies. *Politics & Gender*, 14(01), 27–55. <https://doi.org/10.1017/S1743923X17000514>
- O'Connor, P. (2020). Why is It So Difficult to Reduce Gender Inequality in Male-Dominated Higher Educational Organizations? A Feminist Institutional Perspective. *Interdisciplinary Science Reviews*, 45(2), 207–228. <https://doi.org/10.1080/03080188.2020.1737903>
- Pano, E., Magre, J., Pons, L., & Casajuana, S. (2022). Institutional Transparency and Gender: Analysing the Municipalities of the Barcelona Metropolitan Area. *Information Polity*, 27(1), 79–95. <https://doi.org/10.3233/IP-200300>
- Postiglione, G. A. (2015). *Education and Social Change in China: Inequality in a Market Economy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315704937>
- Rahayu, L. R., & Lesmana, P. S. W. (2020). Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. *Pustaka*, 20, 31–37.
- Seidman, S., & Alexander, J. C. (Eds.). (2020). *The New Social Theory Reader*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003060963>
-

Copyright Holder :

© Faizal Luqman et al (2023).

First Publication Right :

© Saree: Research in Gender Studies

This article is under:

